



BKAD
SULSEL

Badan Keuangan dan Aset Daerah
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 269. Makassar 90234

2023



Bkad.sulselprov.go.id



[Bkadsulsel](https://www.instagram.com/Bkadsulsel)



Bkad.sulsel@yahoo.com



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 968/ VI / TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

- tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590)
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Nomor 20)

14. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 7 Juni 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Tempat

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahNya serta usaha yang sungguh-sungguh maka Perubahan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, dapat diselesaikan sesuai amanah peraturan perundang-undangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) ini adalah salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan yang ada di semua perangkat daerah untuk periode 1 tahun anggaran, Olehnya itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, dengan berpedoman RKPD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Demikianlah sekilas pengantar buku ini, semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari BKAD Prov. SulSel. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 1 Juni 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Drs. H. Muhammad Rasyid
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641231 199203 1 123

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	49
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	68
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	87
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	90
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	90
BAB V : PENUTUP	113
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	113
5.2. Rencana Tindak Lanjut.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan yang baik akan terselenggara, apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam lingkup pemerintahan daerah di tingkat provinsi, perencanaan pembangunan melibatkan partisipasi aktif dari perangkat daerah, masyarakat dan kabupaten/kota.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, disusun sebagai salah satu kewajiban bagi tiap instansi (perangkat daerah) dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana salah satu tugas pimpinan perangkat daerah adalah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu rencana kerja perangkat daerah menjadi salah satu alat dalam menilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diemban "Perangkat Daerah" yang mengarah pada terwujudnya *good governance*, sehingga perencanaan bagi sebuah lembaga organisasi mutlak harus ada sebagai arah dan acuan dalam mencapai tujuan organisasi.

Olehnya itu, Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu perangkat daerah dengan tugas dan fungsi selaku pengelola keuangan dan aset di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) tahun 2023 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara khusus di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sekaligus mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum di tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Adapun penyusunan dokumen Perubahan rencana kerja perangkat daerah (Perubahan Renja-PD) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
 - ✓ Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun rencana kerja perangkat daerah
 - ✓ Orientasi mengenai rencana kerja perangkat daerah
 - ✓ Penyusunan agenda kerja
 - ✓ Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD).
2. Penyusunan rancangan awal;
 - ✓ Penyusunan rancangan awal rencana kerja berpedoman pada rencana strategis perangkat daerah, hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi rencana kerja tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan;
 - ✓ Menyempumakan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah.
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
 - ✓ Forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah.

5. Perumusan rancangan akhir;

- ✓ Menyempumakan rancangan rencana kerja perangkat daerah menjadi rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

6. Penetapan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Olehnya itu, satu sama lain harus saling terkait, baik tahapan pelaksanaannya, maupun isi dari tiap dokumen. Dengan demikian, hasil dari pembangunan daerah yang akan dicapai nantinya merupakan cerminan dari dokumen perencanaan yang telah dibuat, demikian pula sebaliknya dokumen perencanaan yang telah dibuat adalah cerminan hasil pembangunan yang akan dicapai.

Dengan demikian, diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam Rencana Strategis dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan melalui bagan alir dibawah ini :

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
2. Agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang akuntabel untuk menjadi pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menganggarkan program dan kegiatan pada tahun 2023.
3. Agar tersedia rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta indikator kinerja yang ingin dicapai terkait urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi pedoman bersama dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di tahun 2023

Secara umum, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 berupaya merumuskan kebijakan dan program pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga lebih mengarah pada pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran – Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan dan Tahunan di tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan kewajiban Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

(berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja perangkat daerah, landasan hukum, serta sistematika penulisan)

1.1. Latar Belakang

(Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat

Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD)

1.2. Landasan Hukum

(Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah)

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA

(berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

(capaian pada tahun n-2, n-1 dan target n-tahun rencana dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

(isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi dalam bersinergi dengan kab/kota, dan dalam pencapaian visi misi RPJMD)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(penjelasan terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan Perangkat Daerah)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota)

- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
(berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan)
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
(berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan)
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
- BAB V : PENUTUP**
5.1. Kaidah Pelaksanaan
5.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Pada tahun 2023 ini, terdapat **2 Tujuan** yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu periode renstra tersisa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas (Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel)

Dari tujuan tersebut diatas, maka selanjutnya dirumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Renja BKAD Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari **2 Sasaran** yang ingin dicapai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Periode Perubahan Renstra BKAD 2018 – 2023 adalah:

Sasaran I

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja,Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 indikator sebagai berikut :

1. Persentase Temuan Material
2. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik
3. Persentase Nilai SAKIP OPD

Sasaran II

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas (Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel), yang terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu
2. Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP
3. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Kelentuan
4. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu

5. Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD

Dan pada tahun 2023, terlihat capaian dari 5 indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang mendukung Indikator Kinerja Daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
"Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah"
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket.
Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	100%			(Jumlah RKA Perangkat Daerah Yang Disampaikan Tepat Waktu : Jumlah Perangkat Daerah) x 100%
Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP	96%	91%	94,79%	(Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapat Opini WTP dari BPK RI : Jumlah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan) x 100%
Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan	100%			(Jumlah Dokumen Pembayaran yang Disampaikan : Jumlah Jumlah Perangkat Daerah) x 100%
Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan	100%	100%	100%	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Keuangan Tepat Waktu				yang Disampaikan Tepat Waktu : Jumlah Perangkat Daerah) x 100%
Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD	1,5%	0,17%	11,33%	Persentase PAD Yang Diperoleh Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dari tabel diatas, terlihat bahwa hingga Triwulan II belum ada realisasi terhadap Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu dan Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP sehingga penetapan APBD di tahun 2023 belum terlaksana sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk dapat dibuatkan Perda tentang APBD Tahun 2023.

Kemudian, dari segi alokasi belanja, tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan ditetapkan 0%. Capaian ini didapat dari rata-rata capaian indikator pada program perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.

Selanjutnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga berjalan dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling telat 30 Juni tiap tahunnya. Yang dimana Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu dengan target yang ditetapkan 100 % sudah mencapai realisasi 100%

Sementara itu, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota, hasil yang ingin dicapai di tahun ini diharapkan Kabupaten/Kota dapat mendapatkan Opini WTP dari BPK RI.

Dari segi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD yang ditargetkan 1,5% hingga Triwulan II tahun 2023 realisasi sebesar 0,17% dengan capaian 11,33%.

Pada tahun 2023, BKAD Prov. SulSel menjalankan 3 Program dan 14 Kegiatan dan 64 Sub Kegiatan, dimana dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis kedua terdapat Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan rincian 10 Sub Kegiatan sebagai berikut

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan realisasi Jumlah Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Telah Dikoordinasikan dan Disepakati hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada terealisasi;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan realisasi Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Telah Dikoordinasikan dan Disepakati hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada terealisasi;
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA – SKPD, dengan realisasi Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi/ Asistensi RKA SKPD yang Dibuat hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada terealisasi;
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan realisasi Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi/ Asistensi RKAP SKPD yang Dibuat hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada terealisasi;
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD, dengan realisasi Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi / Asistensi DPA-SKPD Yang Dibuat dan Jumlah SK Pengesahan DPA-SKPD yang Diterbitkan hingga Triwulan II Tahun 2023 terealisasi sebesar 53 OPD dengan capaian 100%;
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD, dengan realisasi Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi / Asistensi DPPA-SKPD Yang Dibuat dan Jumlah SK Pengesahan DPPA SKPD Yang Diterbitkan hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada realisasi;
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2023 belum terealisasi;
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2023 belum terealisasi;
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan realisasi Jumlah regulasi keuangan daerah terkait perencanaan dan penganggaran yang disusun hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 1 Perda/Pergub (20.00%);

10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dengan realisasi Jumlah laporan hasil koordinasi terkait perencanaan Anggaran Belanja Daerah Telah dilakukan pergeseran anggaran.

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian 7 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota, dengan realisasi Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 0 SK Gubernur;
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota, dengan realisasi Jumlah SK Gubernur Terkait Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada terealisasi;
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2023 belum terealisasi;
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan realisasi Jumlah dokumen pembinaan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten/kota hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 0 Dokumen;
5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan, Dengan realisasi 1 kali pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang keuangan, 82 ASN Laki-Laki Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah dan 43 ASN Perempuan Yang Diundang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023;
6. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan realisasi hingga Triwulan II Tahun 2023 belum terealisasi;

7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 2 Laporan Rekonsiliasi realisasi Bantuan Program Provinsi Untuk Kabupaten/Kota, 6 Laporan Rekonsiliasi realisasi Bagi Hasil Untuk Kabupaten/Kota dan 2 Laporan Rekonsiliasi realisasi Bantuan Keuangan Untuk Kabupaten/Kota yang disusun hingga Triwulan II Tahun 2023.

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan rincian 7 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Adapun realisasi 2 Dokumen Pengelolaan Kas Daerah, 2 Laporan hasil koordinasi pengelolaan kas Daerah dan Bendahara Yang Dibina Terkait Aturan Pengelolaan Kas Daerah hingga triwulan II tahun 2023;
2. Penyiapan Pelaksanaa Pengendalian Anggaran Kas dan SPD, Adapun realisasi Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) Yang Diterbitkan hingga triwulan II tahun 2023 sebanyak 323 SPD (44.80%);
3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, Adapun realisasi 2 Dokumen pengelolaan dana perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dibuat, 2 Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan monitoring pengelolaan dana perimbangan dan Dana Transfer lainnya yang dibuat hingga triwulan II tahun 2023;
4. Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Adapun realisasi 0 Dokumen Realisasi Pembayaran Pinjaman Daerah, 2 dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bank, 2 dokumen hasil koordinasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan lembaga keuangan bukan bank dan 2 dokumen hasil pemantauan Transaksi Non Tunai hingga triwulan II tahun 2023;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Adapun realisasi 6 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, 2 Dokumen Hasil koordinasi terkait realisasi penerimaan, pengeluaran kas dan Pemungutan/Pemotongan dan

Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan 6. Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) hingga triwulan II tahun 2023;

6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D Dengan Instansi Terkait, Adapun realisasi 1 Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan atas SP2D hingga triwulan II tahun 2023;
7. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Adapun realisasi 6 laporan rekapitulasi penyaluran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, 2 dokumen hasil pembinaan penatausahaan bagi hasil pajak, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota hingga triwulan II tahun 2023.

4. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan rincian 5 Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban, dengan realisasi 53 Laporan Keuangan Tahunan SKPD, 0 Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan SKPD, 0 Laporan Keuangan Konsolidasi Triwulan SKPD 7 Laporan Keuangan Tahunan BUMD 1 Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi SKPD hingga triwulan II Tahun 2023;
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Adapun realisasi 318 Surat Pengantar Penerbitan SP2D G/UTU OPD dan 159 Dokumen Hasil Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Belanja SKPD yang Dibuat Hingga Triwulan II Tahun 2023;
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi, dengan realisasi 0 Buku LKPD Audited yang disusun, 1 Buku LKPD Unaudited, 1 Buku Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 1 Buku Rancangan Pergub Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Hingga Triwulan II Tahun 2023;
4. Penyusunan Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Adapun realisasi 22 Dokumen Temuan Keuangan yang diproses Tuntutan Ganti Rugi Hingga Triwulan II Tahun 2023;

5. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Hingga Triwulan II Tahun 2023 terealisasi 1 kali Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

5. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Dengan Realisasi 2 Dokumen Pembayaran Bunga Pinjaman (50%), 2 dokumen bantuan keuangan kab/kota (50%), 2 dokumen dana darurat dan mendesak (50%) dan 2 dokumen dana bagi hasil yang disalurkan (25%) hingga Triwulan II Tahun 2023.

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga, dengan realisasi 2 laporan hasil koordinasi dan survey harga terkait penyusunan standarisasi harga satuan barang dan jasa Hingga Triwulan II Tahun 2023;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah belum terealisasi hingga Triwulan II Tahun 2023;
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terealisasi 1 Dokumen hingga Triwulan II Tahun 2023;
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan realisasi 53 berita acara hasil Rekonsiliasi aset tetap, 0 dokumen Penatausahaan Aset Tetap, 1 dokumen Penatausahaan Barang Persediaan, 0 Laporan Barang Milik Daerah, 1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD, 0 Laporan Rekonsiliasi Aset SMA/SMK/SLB hingga Triwulan II Tahun 2023;
5. Inventarisasi Barang Milik Daerah Hingga Triwulan II Tahun 2023 belum ada realisasi;
6. Pengamanan Barang Milik Daerah terealisasi 1 Laporan hingga Triwulan II Tahun 2023;
7. Penilaian Barang Milik Daerah belum terealisasi hingga Triwulan II Tahun 2023;
8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan realisasi 0 Laporan hasil pembinaan pengelolaan barang milik daerah pada OPD hingga Triwulan II Tahun 2023;
9. Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan realisasi 27 OPD yang ditetapkan

Status Penggunaannya, 0 Dokumen Hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 Keputusan Gubernur tentang Penghapusan BMD yang Diterbitkan hingga Triwulan II Tahun 2023.

Adapun Sasaran Strategis yang pertama, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dari BKAD Prov. SulSel yang meliputi peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Terdapat 3 indikator yang ingin dicapai yakni Persentase Temuan Material dalam hal ini, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada tahun tersebut. Tipe pencapaian untuk indikator ini bersifat menurun. Capaian Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material yang merupakan indikator kinerja dari sasaran Menurunnya temuan pemeriksaan yang ada di BKAD dengan target persentase minimal 0,75%, Selanjutnya Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dengan target 100% dimana Setiap Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Kerja BKAD diharapkan mendapat pencapaian kinerja yang baik dan terus meningkat, Kemudian dari Persentase Nilai SAKIP OPD juga belum menunjukkan hasil dengan target capaian 81%, dimana capaian nilai SAKIP tahun 2020 yang diperoleh yakni Predikat A. Hal ini menunjukkan, BKAD Prov. SulSel menunjukkan perhatian yang serius dalam mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal. Untuk lebih jelasnya, dijelaskan di tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah”

Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Ket.
Persentase Temuan Material	1%	0%	0%	(Jumlah Temuan Pemeriksaan Material / Jumlah Realisasi Belanja Daerah) x 100%
Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	(Jumlah ASN Dengan Nilai SKP Kategori Baik : Jumlah ASN BPKD) x 100%
Persentase Nilai SAKIP OPD	81%	81%	100%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat/ASN Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Dari analisis capaian kinerja Sasaran pertama diatas, dapat dilihat bahwa BKAD Prov. SulSel dalam meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN, meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diharapkan berjalan baik dengan berbagai upaya yang akan dilakukan antara lain perbaikan fasilitas dan sarana kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan lainnya. Selain itu secara rutin, diadakan pertemuan internal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan konsultasi kepada pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan professional.

Pada tahun 2023, BKAD Prov. SulSel menjalankan 1 Program, 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dalam mendukung pencapaian Sasaran pertama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 Dokumen Perjanjian Kinerja, 1 Dokumen Rencana Aksi, 1 Dokumen Renstra Yang Disusun hingga Triwula II Tahun 2023;
2. Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen RKA dan DPA dan 1 Dokumen RKA dan DPA Yang Disusun hingga Triwula II Tahun 2023;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi 21 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah dan 6 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Dan Informasi Kinerja Yang Dikumpulkan hingga Triwulan II Tahun 2023.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi 9 Dokumen Gaji dan Tunjangan Yang Terbayarkan hingga Triwula II Tahun 2023;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi 767 Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan 12 Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang Di Buat hingga Triwulan II Tahun 2023;
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan realisasi 6 Laporan Keuangan SKPD Berbasis AkruaL Yang Dibuat dan 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan hingga Triwulan II Tahun 2023;
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan realisasi 3 Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi LHP hingga Triwulan II Tahun 2023;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD dengan realisasi 2 Laporan Triwulan SKPD, 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Laporan Keuangan Pertanggungjawaban BTL, 1 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi Laporan Keuangan, 1 Dokumen Prognosis, 6 Laporan Keuangan Bulanan dan 1 Laporan Semester Yang Dibuat hingga Triwulan II Tahun 2023.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan realisasi 1 Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, 1 Dokumen Hasil Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah, 1 Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan, 1 Laporan Hasil Pemeliharaan Barang, 1 Laporan Hasil Pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dan 1 Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa hingga Triwula II Tahun 2023.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belum terealisasi;
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Terkait Pendataan dan

- Pengolahan Data Kepegawaian dan 6 Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Diolah dan Disusun hingga Triwulan II Tahun 2023
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Belum terealisasi
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Belum Terealisasi hingga triwulan II Tahun 2023
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor hingga Triwulan II Tahun 2023;
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi 6 Dokumen Hasil Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor hingga Triwulan II Tahun 2023;
 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi 6 Dokumen Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu hingga Triwulan II Tahun 2023;
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi 6 Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD hingga Triwulan II Tahun 2023.
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya hingga Triwulan II Tahun 2023.
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi 6 Dokumen biaya tagihan telepon, air dan listrik hingga Triwulan II Tahun 2023.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi 6 Dokumen pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 dan 6 Dokumen kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 Yang dipelihara hingga Triwulan II Tahun 2023;

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi 2 Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya hingga Triwulan II Tahun 2023;
3. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi 2 Dokumen Hasil Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya hingga triwulan II Tahun 2023.

Secara lebih lengkap, hasil capaian kinerja program dan kegiatan BKAD Prov. Sulsel tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut ini :



TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD TAHUN n-1 (%)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
				K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6			7		8		9	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
05.02	KEUANGAN													
05.02	Badan Keuangan dan Aset Daerah													
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan yang Tepat Waktu	%	100.0	2,209,807,117,521.0	100.0	2,209,807,117,521.0	2,562,381,133,602.0	0.0	1,761,806,561,979.75	0.0	68.75	0.0	79.79
		Persentase Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	%	100.0		100.0			100.0		100.0		100.0	

		Persentase serapan belanja daerah	%	96.0		96.0			32.95		34.32		34.32	
		Tingkat Kepatuhan Kab/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100.0		100.0			0.0		0.0		0.0	
		Tingkat Kepatuhan Kab/Kota dalam menyampaikan Ranperda dan Ranperkada Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi tepat waktu	%	100.0		100.0			0.0		0.0		0.0	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	100.0	4,260,105,400.0	100.0	4,260,105,400.0	3,853,530,000.0	20.25	1,344,080,907.0	20.25	34.88	20.25	31.55
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2.0	132,967,600.0	2.0	132,967,600.0	59,396,000.0	0.0	39,396,000.0	0.0	66.33	0.0	127.40
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2.0	17,988,000.0	2.0	17,988,000.0	40,848,000.0	0.0	0.0	0.0		0.0	160.89
5.02.02.1.01.03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKASKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	53.0	268,655,000.0	53.0	268,655,000.0	309,870,500.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
5.02.02.1.01.04	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKASKPD	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	Dokumen	53.0	268,655,000.0	53.0	268,655,000.0	312,905,500.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.46

5.02.02.1.0 1.05	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Doku men	53.0	20,000,000.0	53.0	20,000,000.0	20,000,000.0	53.0	19,822,978.0	100.0	95.11	100.0	99.11
5.02.02.1.0 1.06	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPASKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	Doku men	53.0	20,000,000.0	53.0	20,000,000.0	20,000,000.0	33.0	0.0	62.26		62.26	
5.02.02.1.0 1.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Doku men	4.0	2,437,029,000.0	4.0	2,437,029,000.0	2,354,469,000.0	1.0	1,086,903,867.0	25.0	46.16	25.0	44.60
5.02.02.1.0 1.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doku men	3.0	445,242,000.0	3.0	445,242,000.0	403,560,000.0	0.0	63,425,560.0	0.0	15.72	0.0	91.64
5.02.02.1.0 1.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Doku men	5.0	649,568,800.0	5.0	649,568,800.0	332,481,000.0	1.0	134,532,502.0	20.0	46.46	20.0	20.71
Predikat Kinerja:														
5.02.02. 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	%	100.0	1,950,870,700.0	100.0	1,950,870,700.0	2,062,323,300.0	0.0	537,420,330.0	0.0	26.06	0.0	27.55

		Capaian Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota	%	100.0		100.0			24.02		24.02		24.02	
5.02.02.1.0 2.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Lap oran	24.0	347,029,000.0	24.0	347,029,000.0	393,429,800.0	0.0	181,940,190.0	0.0	46.24	0.0	52.43
5.02.02.1.0 2.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Lap oran	24.0	312,235,000.0	24.0	312,235,000.0	230,435,100.0	0.0	63,420,000.0	0.0	27.52	0.0	160.18
5.02.02.1.0 2.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Lap oran	74.0	499,986,100.0	74.0	499,986,100.0	499,984,800.0	0.0	100,731,000.0	0.0	20.15	0.0	104.23
5.02.02.1.0 2.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Lap oran	2.0	611,623,000.0	2.0	611,623,000.0	468,485,000.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
5.02.02.1.0 2.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Doku men	361.0	179,997,600.0	361.0	179,997,600.0	169,996,200.0	215.0	73,951,569.0	59.56	43.50	59.56	41.08

Predikat Kinerja														
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	100.0	3,750,000,000.0	100.0	3,750,000,000.0	3,498,309,800.0	38.30	1,536,758,770.0	38.30	43.93	38.30	40.98
		Rata-Rata Capaian Pelaksanaan Belanja Deraah Perangkat Daerah Sulawesi Selatan	%	95.0		95.0			32.95		34.68		34.68	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	10.0	1,900,000,000.0	10.0	1,900,000,000.0	1,724,573,800.0	5.0	833,726,635.0	50.0	48.34	50.0	43.88
5.02.02.1.03.03	Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	721.0	250,000,000.0	721.0	250,000,000.0	200,000,000.0	721.0	113,227,646.0	100.0	56.61	100.0	45.29
5.02.02.1.03.05	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	8.0	450,000,000.0	8.0	450,000,000.0	429,997,000.0	2.0	120,716,792.0	25.0	28.07	25.0	26.83
5.02.02.1.03.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	13.0	370,000,000.0	13.0	370,000,000.0	344,987,000.0	3.0	132,339,832.0	23.08	38.36	23.08	35.77

5.02.02.1.0 3.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	28.0	150,000,000.0	28.0	150,000,000.0	268,752,000.0	13.0	82,830,732.0	46.43	30.82	46.43	55.22
5.02.02.1.0 3.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SPD dengan Instansi Terkait	Dokumen	4.0	130,000,000.0	4.0	130,000,000.0	130,000,000.0	2.0	47,827,118.0	50.0	36.79	50.0	36.79
5.02.02.1.0 3.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	75.0	500,000,000.0	75.0	500,000,000.0	400,000,000.0	0.0	206,090,015.0	0.0	51.52	0.0	41.22
	<i>PredWak Kinerja</i>													
5.02.02. 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Koordinasi, Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100.0	2,949,964,000.0	100.0	2,949,964,000.0	2,787,386,000.0	53.24	1,221,262,951.0	53.24	43.85	53.24	41.43
		Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	%	100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		

5.02.02.1.0 4.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Do kume n	131.0	299,989,700.0	131.0	299,989,700.0	299,987,500.0	61. 0	11,504,606.0	46.56	3.84	46.56	3.84
5.02.02.1.0 4.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Lapor an	2,067. 0	649,986,800.0	1,166. 0	649,986,800.0	649,984,900.0	371.0	307,917,713.0	31.82	47.37	17.95	47.37
5.02.02.1.0 4.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Doku men	9.0	1,199,998,100.0	9.0	1,199,998,100.0	1,179,996,300.0	4.0	521,803,240.0	44.44	44.22	44.44	43.48
5.02.02.1.0 4.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Doku men	25.0	299,999,600.0	25.0	299,999,600.0	247,444,900.0	12.0	94,521,240.0	48.0	38.20	48.0	31.51
5.02.02.1.0 4.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	288.0	499,989,800.0	288.0	499,989,800.0	499,972,400.0	250.0	286,516,152.0	86.81	69.89	86.81	57.30
	<i>Predikat Kinerja</i>													

5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100.0	2,196,896,177,421.0	100.0	2,196,896,177,421.0	2,550,179,584,502.0	31.25	1,757,166,039,021.75	31.25	68.90	31.25	79.98
5.02.02.1.0 5.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	4.0	2,049,717,475.0	4.0	2,049,717,475.0	2,049,717,475.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
5.02.02.1.0 5.06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen bantuan keuangan kab/kota yang disalurkan	Dokumen	12.0	608,913,717,000.0	4.0	608,913,717,000.0	542,224,433,676.0	2.0	190,956,306,046.0	50.0	35.22	16.67	31.36
5.02.02.1.0 5.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4.0	60,000,000,000.0	4.0	60,000,000,000.0	11,726,386,278.0	1.0	322,622,620.0	25.0	2.75	25.0	0.54
5.02.02.1.0 5.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4.0	1,525,932,742,946.0	4.0	1,525,932,742,946.0	1,994,179,047,073.0	2.0	1,565,887,110,355.75	50.0	78.52	50.0	102.62
	<i>Predikat Kinerja</i>													
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tindak lanjut rencana aksi manajemen aset daerah	%	92.0	5,350,000,000.0	92.0	5,350,000,000.0	4,891,284,000.0	0.0	1,442,266,711.0	0.0	29.49	0.0	48.55
		Persentase tanah pemprov yang telah bersertifikat	%	58.0		58.0			60.18		103.76		103.76	

5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100.0	5,350,000,000.0	100.0	5,350,000,000.0	4,891,284,000.0	50.39	1,442,266,711.0	50.39	29.49	50.39	26.94	
		Cakupan Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Sesuai Ketentuan	%	100.0		100.0			88.88		88.88			88.88	
		Cakupan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Yang Digunakan dan Dimanfaatkan	%	36.0		36.0			34.0		94.44			94.44	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	6.0	450,000,000.0	6.0	450,000,000.0	313,366,500.0	2.0	136,332,050.0	33.33	43.51	33.33	30.30	
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2.0	20,000,000.0	2.0	20,000,000.0	60,852,500.0	1.0	11,404,810.0	50.0	18.74	50.0	57.02	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5.0	120,000,000.0	5.0	120,000,000.0	49,530,700.0	1.0	18,816,289.0	20.0	37.99	20.0	15.68	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	191.0	250,000,000.0	191.0	250,000,000.0	247,945,100.0	133.0	19,078,483.0	69.63	7.69	69.63	7.63	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	55.0	1,040,000,000.0	55.0	1,040,000,000.0	1,037,029,700.0	53.0	409,609,401.0	96.36	39.50	96.36	39.39	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	5.0	2,380,000,000.0	5.0	2,380,000,000.0	1,373,840,200.0	0.0	462,385,052.0	0.0	33.66	0.0	57.96	

5.02.03.1.0 1.06	Penilaian Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah	Lapor an	1.0	120,000,000.0	1.0	120,000,000.0	618,622,500.0	1.0	137,780,598.0	100.0	22.27	100.0	114.82
5.02.03.1.0 1.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Lapor an	3.0	300,000,000.0	3.0	300,000,000.0	387,329,500.0	1.0	88,161,799.0	33.33	22.76	33.33	29.39
5.02.03.1.0 1.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Doku men	59.0	670,000,000.0	59.0	670,000,000.0	802,767,300.0	30.0	158,693,189.0	50.85	19.77	50.85	23.69
	<i>Indikator Kinerja</i>													
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100.0	57,801,567,143.0	100.0	57,801,567,143.0	42,243,492,532.0	35.18	20,477,169,690.0	35.18	48.47	35.18	35.54
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	75.0		35.0			0.0		0.0		0.0	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100.0		100.0			100.0		100.0		100.0	
X.XX.01. 1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100.0	1,600,000,000.0	100.0	1,600,000,000.0	1,629,999,700.0	37.93	602,296,464.0	37.93	36.95	37.93	37.64
X.XX.01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Do kume n	16.0	400,000,000.0	16.0	400,000,000.0	300,310,600.0	8.0	114,637,385.0	50.0	38.17	50.0	28.66

X.XX.01.1.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	4.0	367,320,000.0	4.0	367,920,000.0	392,710,700.0	0.0	130,140,798.0	0.0	33.14	0.0	35.37
X.XX.01.1.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	4.0	132,080,000.0	4.0	132,080,000.0	61,662,700.0	2.0	14,117,900.0	50.0	22.90	50.0	10.69
X.XX.01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	58.0	700,000,000.0	58.0	700,000,000.0	875,315,700.0	30.0	343,400,381.0	51.72	39.23	51.72	49.05
	<i>Predikat Kinerja</i>													
X.XX.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100.0	47,228,642,177.0	100.0	47,228,642,177.0	32,361,046,380.0	50.74	15,760,286,616.0	50.74	48.70	50.74	33.37
X.XX.01.1.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Crang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bula n	137.0	46,163,641,977.0	137.0	46,163,641,977.0	31,114,549,480.0	137.0	15,146,484,509.0	100.0	48.68	100.0	32.81
X.XX.01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	3,077. 0	129,999,300.0	3,077. 0	129,999,300.0	265,257,000.0	#####	167,664,290.0	36.46	63.21	36.46	128.97
X.XX.01.1.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Doku men	17.0	234,995,000.0	17.0	234,995,000.0	234,607,300.0	8.0	162,651,201.0	47.06	69.33	47.06	69.21
X.XX.01.1.0 2.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Doku men	11.0	199,998,600.0	11.0	199,998,600.0	215,525,000.0	2.0	44,266,213.0	18.18	20.54	18.18	22.13

X.XX.01.1.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	25.0	500,007,300.0	25.0	500,007,300.0	531,107,600.0	13.0	239,220,403.0	52.0	45.04	52.0	47.84
	Predikat Kinerja													
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tepat Waktu	%	100.0	220,000,000.0	100.0	220,000,000.0	230,731,000.0	53.85	87,717,785.0	53.85	38.02	53.85	39.87
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13.0	220,000,000.0	13.0	220,000,000.0	230,731,000.0	10.0	87,717,785.0	76.92	38.02	76.92	39.87
	Predikat Kinerja													
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	%	100.0	3,435,592,712.0	100.0	3,435,592,712.0	3,176,379,616.0	20.66	1,919,500,048.0	20.66	60.43	20.66	55.87
X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	435.0	499,990,000.0	435.0	499,990,000.0	378,715,000.0	142.0	312,480,000.0	32.64	82.51	32.64	62.50

X.XX.01.1.0 5.03	Perdataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Perdataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Do kume n	16. 0	2,451,902,712.0	16. 0	2,451,902,712.0	2,309,926,616.0	11. 0	1,599,930,048.0	68.75	69.26	68.75	65.25
X.XX.01.1.0 5.10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	50.0	130,000,000.0	50.0	130,000,000.0	143,460,000.0	0.0	7,090,000.0	0.0	4.94	0.0	538 4
X.XX.01.1.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	28.0	353,700,000.0	28.0	353,700,000.0	344,278,000.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	<i>Predikat Kinerja</i>													
X.XX.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	%	100 .0	1,299,783,000.0	100 .0	1,299,783,000.0	1,230,253,600.0	33. 41	473,536,904.0	33.4 1	38. 49	33.4 1	36.4 3
X.XX.01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	520.0	99,995,000.0	520.0	99,995,000.0	100,043,000.0	350.0	59,224,309.0	67.31	59.20	67.31	59.23
X.XX.01.1.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,160. 0	300,000,000.0	1,160. 0	300,000,000.0	327,214,600.0	0.0	37,437,885.0	0.0	11.44	0.0	12.48
X.XX.01.1.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapor an	12.0	400,000,000.0	12.0	400,000,000.0	300,128,000.0	6.0	133,373,297.0	50.0	44.44	50.0	33.34
X.XX.01.1.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	12. 0	499,788,000.0	12. 0	499,788,000.0	502,858,000.0	6.0	243,501,413.0	50.0	48.42	50.0	48.72

	<i>Predikat Kinerja</i>													
X.XX.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100.0	1,247,416,000.0	100.0	1,247,416,000.0	672,075,100.0	8.20	648,816,000.0	8.20	96.54	8.20	52.01
X.XX.01.1.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	122.0	1,247,416,000.0	122.0	1,247,416,000.0	672,075,100.0	10.0	648,816,000.0	8.20	96.54	8.20	52.01
	<i>Predikat Kinerja</i>													
X.XX.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100.0	120,133,920.0	100.0	120,133,920.0	45,021,000.0	50.0	13,808,276.0	50.0	30.67	50.0	11.49
X.XX.01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.0	120,133,920.0	12.0	120,133,920.0	45,021,000.0	6.0	13,808,276.0	50.0	30.67	50.0	11.49
	<i>Predikat Kinerja</i>													
X.XX.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100.0	2,649,999,334.0	100.0	2,649,999,334.0	2,897,986,136.0	26.67	971,207,597.0	26.67	33.51	26.67	36.65
X.XX.01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44.0	1,149,999,334.0	44.0	1,149,999,334.0	1,059,501,036.0	26.0	344,508,365.0	36.36	32.52	36.36	29.96
X.XX.01.1.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.0	1,200,000,000.0	1.0	1,200,000,000.0	1,227,966,100.0	0.0	399,941,360.0	0.0	32.57	0.0	33.33
X.XX.01.1.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	323.0	300,000,000.0	323.0	300,000,000.0	610,519,000.0	141.0	226,757,872.0	43.85	37.34	43.65	75.59
	<i>Predikat Kinerja</i>													

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan digambarkan capaian target sasaran strategis pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri 2 sasaran dari tahun 2023, yakni sebagai berikut:

SASARAN I : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA, PERENCANAAN & PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH;

Tahun 2023 adalah tahun Ketiga dalam periode Perubahan Renstra BKAD Provinsi Sulawesi Selatan, Dimana terdapat sasaran strategis pertama, yakni berhubungan erat dengan pengembangan internal dari BKAD Prov. SulSel yang meliputi peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah. Terdapat 3 indikator yang ingin dicapai yakni ASN Nilai SKP Berkategori Baik, dalam hal disiplin maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas yang diberikan, dimana di tahun ini hasil yang diperoleh dapat di ukur hingga akhir tahun penilaian kinerja atau tingkat capaian belum terealisasi hingga Triwulan II 2023, Selanjutnya Persentase Temuan Material dengan Target 0,75% diharapkan dapat meminimalisir hasil realisasi kegiatan dan anggaran yang berindikasi temuan dari pemeriksa, Kemudian dari Persentase Nilai SAKIP OPD juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat capaian 100%, yang ditandai dengan capaian nilai SAKIP tahun 2023 yang diperoleh yakni Predikat A (81%). Hal ini menunjukkan, BKAD Prov. SulSel menunjukkan perhatian yang serius dalam mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang akuntabel dari segala aspek, internal maupun eksternal.

Di tahun 2023 ini, dimana menjadi tahun keempat dari pengukuran kinerja dari Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan telah sangat baik, dimana BKAD berhasil memperlihatkan adanya upaya dalam meningkatkan kedisiplinan ASN dengan kategori baik, meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah serta meningkatkan nilai SAKIP dari BKAD. Hal ini tentu menjadi pendorong dalam mencapai target-target kinerja di tahun-tahun mendatang

SASARAN II : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH;

Selanjutnya sasaran strategis yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKAD Prov. SulSel kedepannya. Sasaran pertama adalah terkait erat dengan tupoksi BKAD selaku Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik dalam perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan belanja daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hingga tugas selaku fasilitator dan Pembina pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota. Dan pada tahun ini, terlihat capaian yang memuaskan dari beberapa indikator yang ada dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang pertama yakni penetapan APBD yang tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember tiap tahunnya, kemudian dari segi alokasi belanja, rata-rata akurasi dari target alokasi belanja yang ditetapkan mendekati 100%. Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing OPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang diperkenankan dalam aturan perundang-undangan. Olehnya itu, BKAD Prov. SulSel secara berkala tiap tahun sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan pelatihan kepada aparat perencana anggaran di seluruh OPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Selanjutnya, dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh OPD dapat berjalan maksimal dan melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100% yakni sebesar 100,00% atau tingkat capaian (100,00%). Hal ini dikarenakan optimalisasi alokasi anggaran yang diberikan, untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna anggaran di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel. Pemantaatan dan atau pergeseran alokasi anggaran dari kegiatan/belanja tertentu ke kegiatan/belanja yang mendukung

pencapaian kinerja turut andil dalam optimalisasi serapan anggaran. BKAD Prov. SulSel melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan / bendahara di seluruh OPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga tampak sangat baik seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling telat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku Pembina pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota, hasil yang di harapkan dicapai di tahun ini dimana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK RI sebanyak 24 Kabupaten/Kota mencapai target 100%. Meskipun demikian, dilihat dari segi komitmen, Pemerintah Kab/Kota memperlihatkan keseriusan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kab/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Evaluasi BKAD serta tindakan lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara BKAD Prov. SulSel dengan Pemerintah Kab/Kota merupakan pertanda baik bahwa harapan agar nantinya di tahun 2023 seluruh Kab/Kota memperoleh opini WTP bukan hal yang tidak mungkin untuk dapat diwujudkan.

Sasaran kedua, yang bertujuan untuk mengukur kinerja pengelolaan barang dan aset daerah dalam memberikan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelayanan pemerintah daerah dengan hasil yang telah dicapai antara lain terkait Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk tahun 2023 dari target 53 OPD Penetapan Status Penggunaan, dapat diterbitkan 42 SK Gubernur Sulawesi Selatan dari OPD yang mengusulkan penetapan status barangnya guna ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

Selanjutnya terkait dengan bidang tanah yang bersertifikat, Sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan permohonan penerbitan Sertifikat tanah kepada 24 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan progres sebagai berikut:

a. Hasil Identifikasi

1. Bersertifikat	515 Bidang
2. Belum Bersertifikat	372 Bidang
Jumlah	790 Bidang

b. Progres atas aset yang belum bersertifikat:

1. Sementara Dalam Proses di BPN 29 Bidang
(ditargetkan terbit tahun 2023)

Jumlah Progres Persertifikatan 29 Bidang

Sepanjang tahun 2023, melalui inventarisasi dan rekonsiliasi terkait penyerahan Aset P3D Bidang Pendidikan, Perhubungan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan maka sementara telah dapat diinventarisasi penambahan aset tanah sebanyak 484 Bidang sehingga total Bidang Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sebanyak 1.274 Bidang.

Selanjutnya terkait dengan jumlah aset bermasalah yang ditindaklanjuti adalah terlaksananya Penyelesaian Aset Bermasalah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan fokus utama dalam penyelesaian aset bermasalah adalah dengan melaksanakan 41 penyelesaian aset bermasalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) disertai beberapa unsur diantaranya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Surat Kuasa Khusus/SKK), BPKP (fokus pada Percepatan P3D), Badan Pertanahan Nasional (pada bagian dasar kepemilikan tanah). Dari 41 Bidang Aset Bermasalah, saat ini yang telah dinyatakan selesai sebanyak 14 bidang aset yang telah disampaikan kepada Korsupgah KPK. Disamping itu, terdapat 5 bidang aset bermasalah yang akan ditingkatkan statusnya dari Non Litigasi menjadi Litigasi (penyelesaian permasalahan hukum melalui pengadilan) yang direncanakan akan diselesaikan pada Tahun 2020

Dari capaian kinerja yang telah dihasilkan tersebut diatas, ada beberapa factor yang mendorong pencapaian tersebut antara lain dukungan dari Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah serta Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan yang memperlancar proses inventarisasi dan pengamanan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pihak ketiga. Selain itu, SDM yang dimiliki oleh BKAD dan pengelola barang di seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel juga turut andil dalam membantu menghimpun dan menertibkan administrasi pengelolaan barang dan aset daerah yang dimiliki dengan memanfaatkan sistem informasi.

Meskipun memang, masih ada juga beberapa faktor penghambat yang dirasakan dalam pengelolaan aset ini yakni terkait masih adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut, demikian juga beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi, kemudian adanya beberapa aset yang terletak di Kabupaten/Kota yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang mengalami kondisi rusak dan kurang terpelihara, masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan serta masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang milik daerah di OPD masing-masing, sehingga menghambat proses perencanaan dan pelaporan barang milik daerah dan juga termasuk masih kurang dalam melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak lain.

Olehnya itu, BKAD Prov. SulSel telah dan akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan beberapa cara antara lain melakukan pembinaan yang intensif melalui pendampingan/bimbingan teknis/pelatihan kepada seluruh OPD lingkup Pemprov SulSel terkait pengelolaan aset dan barang daerah yang dikuasainya baik dalam perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan dan pelaporan barang, pengamanan, pemanfaatan serta pemeliharaan aset daerah. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah mendorong peningkatan anggaran terkait pengelolaan barang di seluruh OPD secara proporsional agar OPD dapat meningkatkan kinerja pengelolaan barang dengan lebih baik lagi melalui sarana dan prasarana yang baik, SDM yang kompeten dan reward yang seimbang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel T-C.30** *Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Hingga Triwulan II Tahun 2023*, dibawah ini:



TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI 2023	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N		TAHUN N+1	TAHUN N+2	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Besaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah										
1	Persentase Tamuan Material					0,5%	0%	0,5%	0,25%	Belum mencapai target yang ditetapkan
2	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik					100%	100%	100%	100%	Telah mencapai target yang ditetapkan
3	Persentase Nilai SAKIP OPD					81%	0%	81%	81%	Belum mencapai target yang ditetapkan

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah										
4	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu					100%	100%	100%	100%	Telah mencapai target yang ditetapkan
5	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP					100%	92%	100%	100%	Belum mencapai target yang ditetapkan
6	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan					100%	100.00%	100%	100%	Telah mencapai target yang ditetapkan
7	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu					100%	100%	100%	100%	Telah mencapai target yang ditetapkan
8	Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD					2%	0,36%			Belum mencapai target yang ditetapkan
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS							98.00%			

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pencapaian kinerja dari Badan Keuangan dan Aset Daerah hingga Triwulan II tahun 2023, dimana terdapat **3 program** dan **14 kegiatan** dan **64 Sub Kegiatan** dengan persentase realisasi anggaran rata-rata sebesar **40,38%** dan realisasi fisik pencapaian sasaran sebesar **46,31%**. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah telah mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada program dan kegiatan tersebut hingga Triwulan II tahun 2023 ini, baik dalam hal kinerja keuangan maupun pencapaian sasaran-sasaran yakni :

1. Persentase Temuan Material;
2. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik;
3. Persentase Nilai SAKIP OPD;
4. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan RKA Tepat Waktu;
5. Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP;
6. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan;
7. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu;
8. Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD terhadap PAD.

Hasil dari pencapaian itu di harapkan bermuara pada keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat mendapatkan kembali penilaian BPK RI terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan **"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"**.

Namun demikian, tentunya masih ada hal yang perlu mendapat perbaikan dan peningkatan, dalam upaya mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Beberapa permasalahan yang ada maupun yang berpotensi muncul di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang menjadi fokus perhatian dalam pemerintahan Provinsi dalam mendukung pembangunan dan perbaikan Ekonomi di setiap Kab/Kota di Provinsi Sulawesi selatan, sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaannya;

2. Percepatan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta Penyelesaian Temuan Kerugian Daerah yang masih perlu ditingkatkan;
3. Adanya beberapa bidang aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tumpang tindih dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahkan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota telah mensertifikatkan lahan tersebut
4. Adanya beberapa aset milik Pemerintah yang dikuasai ataupun diserobot oleh Pihak Ketiga bahkan ada yang telah mensertifikatkan selain atas nama Pemerintah Provinsi serta untuk mengambil alih lahan tersebut membutuhkan proses hukum
5. Masih adanya beberapa aset yang terletak di Kabupaten/Kota yang tidak dimanfaatkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi OPD serta dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat bangunan yang mengalami kondisi rusak dan kurang terpelihara
6. Terdapat beberapa OPD yang masih lemah dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sehingga dapat berpotensi dikuasai oleh pihak lain
7. masih adanya beberapa bidang aset yang belum memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah bahkan ada diantaranya tidak didukung oleh bukti fisik perolehan
8. masih kurangnya perhatian OPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi barang yang dikuasainya sehingga menghambat proese perencanaan dan pelaporan barang milik daerah
9. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai, ruangan kerja yang terbatas dan fasilitas layanan umum yang kurang nyaman.
10. Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja BKAD Prov. SuLSel yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.
11. Tingkat Partisipasi *stake holder* lingkup BKAD Prov. SuLSel dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum optimal

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan dan langkah strategis yang tentunya berpedoman pada tugas fungsi dan wewenang Badan Keuangan dan Aset Daerah, dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi, yang kami paparkan dalam matriks dibawah ini :

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
<p>1. Komitmen pimpinan dan staf untuk mempertahankan keberhasilan yang telah diraih hingga saat ini</p> <p>2. Dukungan Anggaran/Pendanaan Yang Kuat</p> <p>3. Besarnya tugas, fungsi dan wewenang yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>4. Dukungan oleh Korsupgah KPK melalui Rencana Aksi Program Penertiban Aset Daerah</p> <p>5. dukungan dari Badan Pertanahan Nasional melalui MoU Bidang Pertanahan</p> <p>6. Dukungan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) atas penanganan hukum secara litigasi/non litigasi terhadap penyelesaian aset bermasalah</p>	<p>1. Belum optimalnya penerapan SOP</p> <p>2. Belum ada Standar Pelayanan / Janji Layanan yang dibuat</p> <p>3. Gedung kantor yang tidak proporsional lagi dengan jumlah aparatur serta tuntutan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan</p>	<p>1. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penganggaran Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah Yang Terintegrasi</p> <p>2. Kemauan dan tanggungjawab yang semakin meningkat dari aparat pengelola keuangan untuk terus memperbaiki sistem dan layanan yang diberikan</p>	<p>1. Upaya untuk mempertahankan perolehan Opini WTP dan BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah</p> <p>3. Regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah yang hampir tiap tahun mengalami perubahan, harus dipahami dan diaplikasikan dengan benar</p>

Berdasarkan analisis SWOT yang dipaparkan diatas, maka beberapa hal yang menjadi isu strategis yang akan menjadi perhatian pada penyusunan Perubahan rencana kerja di tahun 2023, adalah terkait dengan:

1. Pengelolaan belanja bagi hasil kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang lebih baik, dengan mengupayakan penerapan sistem dan prosedur yang sederhana, cepat dan akuntabel;
2. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dan BPKD Prov. SulSel secara khusus;
3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi Dengan Sistem Perencanaan dan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (E-Planning, E-Budgeting dan E-RKBMD/SIMDA) ,
4. Koordinasi yang intensif serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah secara terus menerus kepada 24 Kabupaten/Kota, baik dengan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) maupun pihak legislatif (DPRD Kabupaten/Kota)
5. Perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya
6. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Percepatan Penyerapan Anggaran, serta Koordinasi Secara Berkala Atas Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD Prov. SulSel, baik dengan unit kerja lingkup BPKD maupun dengan perangkat daerah yang terkait;
7. Optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKD Prov. SulSel, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait dengan pelayanan dalam sektor pemerintahan.

Ketujuh hal ini akan menjadi isu strategis yang akan dibawa oleh BKAD Prov. SulSel di tahun 2023, sehingga rumusan program dan kegiatan serta pendanaan yang proporsional yang tepat diharapkan akan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian 3 sasaran strategis dari BKAD Prov SulSel, yakni pengelolaan

keuangan daerah yang meningkat, pengelolaan barang dan aset daerah yang optimal serta akuntabilitas kinerja yang meningkat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, program dan kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh BKAD Prov. SulSel, baik dari segi jumlah program dan kegiatan serta Sub kegiatan, lokasi kegiatan, target indikator kinerja serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan maupun Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program Sebanyak **3 Program**, yang terdiri atas **14 Kegiatan** dan **64 Sub Kegiatan**
- Pagu Indikatif Rancangan Awal RKPD/ Kebutuhan Dana Sebesar **Rp 2,711,999,011,920.00**
- Pagu Indikatif / Kebutuhan Dana Setelah Perubahan Sebesar **Rp 2,607,850,883,054.00**



T-C. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
KEUANGAN				2,711,999,011,920	KEUANGAN				2,607,850,883,054
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				106,092,204,469	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				39,482,828,392
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,858,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,834,233,790
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	650,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	315,052,600

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	453,442,700
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	61,662,700
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Laporan	700,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Laporan	1,004,075,700
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				94,774,516,008	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28,995,936,503
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137 Orang/Bulan	93,024,516,008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137 Orang/Bulan	27,646,862,603

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3077 Dokumen	300,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3077 Dokumen	265,257,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Dokumen	235,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Dokumen	430,500,300
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	315,000,000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	76,743,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Laporan	900,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Laporan	576,573,600
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				320,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				230,731,000

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	320,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	230,731,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2,230,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,295,684,353
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Paket	600,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Paket	378,715,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	550,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	2,629,231,353
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	130,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	143,460,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Orang	950,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Orang	144,278,000

Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,970,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,511,160,600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520 Paket	170,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520 Paket	100,043,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1160 Paket	900,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1160 Paket	327,214,600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	550,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300,128,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	783,775,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				1,247,688,461	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				672,075,100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122 Unit	1,247,688,461	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122 Unit	672,075,100

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45,021,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	220,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	45,021,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,480,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,897,986,136
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Unit	1,150,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Unit	1,059,501,036
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	870,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,227,966,100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323 Unit	460,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323 Unit	610,519,000

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2,602,481,807,451	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2,563,366,770,662
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				4,521,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3,853,530,000
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	133,000,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	59,396,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	18,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	40,848,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 dokumen	320,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 dokumen	109,870,500
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 dokumen	320,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 dokumen	112,905,500

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	20,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	20,000,000
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	20,000,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	20,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	2,250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	2,354,469,000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	550,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	403,560,000

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	850,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	132,481,000
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	40,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				2,785,000,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				2,062,323,300
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	450,000,000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	393,429,800
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	300,000,000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	230,435,100

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Laporan	500,000,000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Laporan	499,984,800
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	155,000,000	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	900,000,000	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	468,485,000

Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	300,000,000	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	299,992,400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361 Dokumen	180,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361 Dokumen	169,996,200
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				4,455,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				3,498,309,800
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	2,110,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	1,724,573,800

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	721 Dokumen	250,000,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	721 Dokumen	200,000,000
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	400,000,000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	429,997,000
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	370,000,000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	344,987,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Laporan	400,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Laporan	268,752,000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	175,000,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	130,000,000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	550,000,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	400,000,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3,500,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2,787,386,000

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131 Dokumen	400,000,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131 Dokumen	299,987,500
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1166 Laporan	800,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1166 Laporan	649,984,900
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	1,350,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	1,179,996,300
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	247,444,900

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288 Orang	650,000,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288 Orang	409,972,400
Pemangjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2,586,820,807,451	Pemangjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2,551,165,221,562
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4,466,445,356	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	2,049,717,475
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	901,000,961,010	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	542,224,433,676
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	150,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	11,726,386,278

Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	1,531,353,401,085	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	1,995,164,684,133
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3,825,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				5,001,284,000
Pengelolaan Barang Milik Daerah				3,825,000,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah				5,001,284,000
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	270,000,000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	313,366,500
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60,852,500
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	145,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	49,530,700

Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191 Laporan	300,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191 Laporan	247,945,100
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Laporan	1,040,000,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Laporan	1,042,845,700
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	1,330,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	1,423,067,200
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	120,000,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	618,622,500

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	350,000,000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	387,329,500
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Perumahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Perumahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59 Dokumen	250,000,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Perumahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Perumahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59 Dokumen	857,724,300
				2,711,999,911,920					2,607,850,883,054

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan analisis hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan juga hasil penelaahan usulan program dan kegiatan yang diambil dari forum perangkat daerah maupun forum lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas fungsi perangkat daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah, sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, juga telah menjangkau informasi terkait usulan program dan kegiatan baik dari Kabupaten/Kota berupa proposal bantuan keuangan, dari masyarakat dan lembaga swasta berupa proposal bantuan hibah yang kesemuanya merupakan bagian dari penganggaran belanja tidak langsung. Olehnya itu, seperti tahun-tahun sebelumnya usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan keuangan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memproses penganggaran dan pelaksanaan belanja tersebut adalah melalui kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara rinci, rencana kegiatan, lokasi, indikator dan target kinerja terkait dengan pengelolaan bantuan hibah dan bantuan keuangan yang diproses oleh BKAD Prov. SulSel untuk tahun 2023 kami sajikan pada tabel di bawah ini :



Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan Dari Kegiatan Masyarakat/Aspirasi Kab/Kota
Sulawesi Selatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub kegiatan/usulan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Vol.	Anggaran	Catatan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengembangan Kabupaten Kota	Kab. Bantaeng	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500.000,000	
	Kab. Barru	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	15,273,019,000	
	Kab. Bone	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	51,725,947,468	

Kab. Bulukumba	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	4.474.177,267
Kab. Enrekang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000
Kab. Gowa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000
Kab. Jeneponto	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	1,000,000,000
Kab. Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	10,000,000,000
Kab. Luwu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	25,403,210,000
Kab. Luwu Timur	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	8,000,000,000

	Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	0
	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000
	Kab. Pangkajene Kepulauan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	20,273,820,000
	Kab. Pinrang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	21,944,719,000
	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	14,668,516,000
	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000
	Kab. Soppeng	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	11,342,170,580

	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	13,756,843,326	
	Kab. Tana Toraja	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	2,088,810,000	
	Kab. Toraja Utara	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000	
	Kab. Wajo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	1,495,203,624	
	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000	
	Kota Palopo	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	0	
	Kota Pare Pare	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 kegiatan Anggaran	500,000,000	

Kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan oleh BKAD Prov. SulSel dalam tahun 2023 ini sebagai bagian implementasi dari visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan pusat-pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di 24 Kabupaten/Kota. Olehnya itu, BKAD Prov. SulSel menjadikan pengelolaan belanja Transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung misi tersebut melalui kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Bunga, Subsidi, Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah pengelola keuangan dan asset daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan melakukan komunikasi, koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, ke Pemerintah Pusat melalui **4 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian** yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional. Olehnya itu, dalam penyusunan dan penetapan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan, perlu memperhatikan dan mempertimbangkan informasi terkait arah kebijakan dari 3 lembaga pemerintah tersebut diatas dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sesuai dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumberdaya berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan Visi RPJMN 2020-2025 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu: "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas" dengan 7 (tujuh) prioritas nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024, terdapat **Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni

1. Peningkatan Kapasitas Dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi :

- 1) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui :
 - a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 - b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
 - c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
 - d. Reviu Ranperda dan Ranperkada.
 - e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbang sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (research based policy).
- 2) Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
 - a. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa;
 - b. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa;
 - c. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi;
 - d. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah;
 - e. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemic Covid-19;

2. Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan **Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sector keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19.
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19.
- c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan perekonomian.
- d. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
- e. Perumusan strategi kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.
- f. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung *sustainable environment*.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca
- h. transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat fundamental ekonomi jangka menengah.
- i. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya saing.
- j. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu.

- k. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya.
- l. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan.
- m. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.

2. **Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. Adapun strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Prioritasi belanja negara dan penyusunan regulasi terkait APBN yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk pendanaan isu strategis jangka menengah, pencapaian prioritas nasional, maupun penanganan bencana nasional secara cepat, efisien, dan tetap akuntabel.
- b. Perumusan kebijakan penganggaran jaring pengaman sosial dan subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi, baik antarprogram maupun antara pusat dan daerah termasuk peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencegah dampak krisis nasional di desa.
- c. Perumusan kebijakan relaksasi dan refocusing belanja K/L, penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan/atau kondisi krisis/darurat nasional serta menstimulasi percepatan pemulihan layanan publik dan perekonomian.
- d. Perumusan kebijakan penganggaran yang inovatif, tepat sasaran, dan lebih efisien dengan implementasi new thinking of working, melalui penerapan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antar stakeholder terkait dengan tetap menjaga aspek good governance.
- e. Penguatan value for money, peningkatan evidence based budgeting, dan monev kebijakan penganggaran dalam proses perencanaan penganggaran.
- f. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) serta Implementasi Redesign Sistem Penganggaran K/L dan daerah berdasarkan standardisasi

- program/kegiatan, outcome/output, satuan biaya, struktur dan kode akun, serta sistem pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
- g. Penerapan sistem konsolidasi penganggaran K/L, Transfer ke Daerah dan Belanja Daerah dalam APBD serta pendanaan terintegrasi (integrated funding) untuk mempercepat pencapaian outcome/output yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan efisiensi anggaran.
 - h. Penerapan sistem asimetrik pengelolaan Transfer ke Daerah berdasarkan kebutuhan layanan dasar publik dan kinerja daerah, serta karakteristik kekhususan daerah untuk mempercepat pemerataan layanan publik antardaerah.
 - i. Pengembangan Dana Transfer Khusus dan sistem insentif untuk meningkatkan daya saing, kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - j. Pengembangan pemanfaatan pembiayaan daerah dan pola kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPBU) untuk percepatan penyediaan layanan/barang publik yang dapat dilakukan dengan skema bisnis.
 - k. Pembangunan mekanisme kerja virtual bagi birokrasi daerah agar lebih agile dengan tetap menjaga aspek good governance.
 - l. Pembangunan mekanisme pelaporan Pemda yang terintegrasi secara menyeluruh dengan basis real time sehingga mendukung perumusan kebijakan yang cepat dan tepat.
 - m. Optimalisasi monitoring dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.
 - n. Peningkatan kualitas pinjaman proyek melalui perbaikan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan reward and punishment.
3. **Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:

- i. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- ii. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
- iii. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

3. Arah dan Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan **Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Strategi 2 - Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi focal point dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam RPJMN 2020-2024. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh sajer yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan

dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pemerintah di masa yang akan datang.

Strategi 5 - Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Rugi Negara

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini berkaitan dengan upaya memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan Negara, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan Negara

b. Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini berkaitan dengan upaya memperkuat aspek-aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, agar proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain

c. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Strategi ini berkaitan dengan upaya meningkatkan peran aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian negara, baik yang disebabkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi, melalui strategi:

Strategi 6 - Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu

organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang dipeniksa, instansi yang berwenang, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta lembaga-lembaga internasional. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Upaya mengoptimalkan sumber daya dan keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan dapat membawa perbaikan dan penyempurnaan terhadap kondisi BPK saat ini. Renstra BPK 2020–2024 telah mengidentifikasi dan mengintegrasikan kondisi saat ini dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF self assessment pada Domain A (Independensi dan Kerangka Hukum) untuk indikator SAI-1 Independensi, Domain B (Tata Kelola Internal dan etika) untuk indikator SAI-3 siklus perencanaan strategis, Domain D (Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya) untuk indikator SAI-21 (Manajemen Keuangan, Aset dan Layanan Pendukung), Domain E (SDM dan Pelatihan) untuk indikator SAI-22 (Manajemen SDM) dan SAI-23 (Pelatihan dan Pengembangan Profesional), dan Domain F (Pengelolaan Komunikasi dengan Stakeholder) untuk indikator SAI-24 (Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif), dan SAI-25 (Komunikasi dengan Media, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat), dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.

4. Arah dan Kebijakan Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dapat dijabarkan **Arah dan Kebijakan** yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut :

1. Arah dan Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden 2020 – 2024, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyerderhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi, maka arah dan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional difokuskan pada:

- a. Optimalisasi manfaat penyelenggaraan Reforma Agraria;
- b. Terdaftarinya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif;
- c. Terwujudnya RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- d. Menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi;
- e. Terwujudnya kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik;
- f. Mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan Negara;
- g. Terwujudnya standar kompetensi SDM profesional menuju birokrasi standar dunia.

2. Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota serta Ketua DPRD dan Forkopimda.

- b. Memberikan peringatan dan pengawasan agar pemerintah daerah mengalokasikan belanja APBD sesuai program prioritas nasional.
 - c. Penguatan peran dan kewenangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Daerah.
 - d. Koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, APIP Daerah dan Aparat Penegak Hukum.
 - e. Melakukan penyesuaian terhadap R-APBD/APBD TA 2020 sesuai 5 program prioritas yang ditetapkan Presiden.
3. Optimalisasi Pelaksanaan Program Strategis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan terus melakukan optimalisasi pelaksanaan program-program strategis, yang meliputi:

- a. Percepatan pemetaan dasar pertanahan;
- b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- c. Penyelenggaraan Reforma Agraria;
- d. Percepatan penyusunan RDTR dalam rangka penataan ruang yang berkualitas;
- e. Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun kepentingan investasi;
- f. Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan, luas lahan baku LP2B dan penyediaan Tanah Reforma Agraria serta penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- g. Penanganan kasus pertanahan dan ruang;
- h. Digitalisasi data pertanahan dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi "Digital Melayani";
- i. Pengukuran batas kawasan hutan;
- j. Legislasi bidang pertanahan, termasuk melanjutkan proses legislasi RUU Pertanahan, pembentukan Lembaga Pengelola Tanah (Bank Tanah) dan Lembaga Pengadilan Pertanahan;
- k. Intensifikasi pemetaan dan penggunaan zona nilai tanah berbasis bidang dan ekstensifikasi pemanfaatan nilai tanah ke berbagai instansi;
- l. Pengembangan sumber daya manusia melalui metode *talent pool*;

Manajemen kualitas dan mitigasi resiko pelaksanaan program strategis pertanahan dan tata ruang.

5. Arah dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta segala unsur yang ada dalam pemerintahan serta keterlibatan masyarakat. Perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintah daerah berkewajiban mendukung pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang berkorelasi satu sama lain.

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan tahun 2023, dirumuskan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 6 prioritas pembangunan, 9 sasaran (12 Indikator Sasaran), dan 69 program prioritas.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 terfokus pada pencapaian target indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2023, RPJMD 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5

(lima) tahunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran misi RPJMD tahun berjalan, berkorelasi dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029.

Untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah, maka tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Memperhatikan arahan tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu.

"Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Membangun Infrastruktur untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas"

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing.
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan.
3. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi.
4. Percepatan Penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat
5. peningkatan nilai tambah komoditas unggulan
6. Pemantapan reformasi birokrasi

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 difokuskan pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
 - b. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik
2. Tujuan 2. Meningkatkan infrastruktur wilayah, dengan sasaran utama adalah meningkatkan aksesibilitas infrastruktur. Tujuan dan sasarannya difokuskan pada:
3. Tujuan 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk perekonomian berbasis sumberdaya alam
 - b. Menurunnya kesenjangan antar lapisan dan antar wilayah
4. Tujuan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara inklusif, dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 - b. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan
 - c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
5. Tujuan 5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk perekonomian berbasis sumberdaya alam
 - b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin dicapai, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.
2. Peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya.
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditi unggulan.
4. Peningkatan kapasitas, keterampilan dan diversifikasi keterampilan kewirausahaan.
5. Pemenuhan akses dan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia serta upaya peningkatan perbaikan gizi masyarakat.
6. Peningkatan akses dan peran pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.
7. Peningkatan produktifitas dan daya saing komoditas berbasis sumberdaya alam serta pengembangan industri.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan tatalaksana dan keterpaduan pengelolaan sumberdaya air.

9. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan
10. Melestarikan sumberdaya alam, lingkungan dan pengelolaan bencana.
11. Peningkatan kelulusan pada pendidikan tinggi bereputasi melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di Tahun 2023 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah, akan mendukung arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui alokasi pendanaan yang proporsional, khususnya dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan administrasi dan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKAD Prov. SulSel

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dihasilkan rumusan tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu 2018 – 2023 sebagai berikut :

Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas (Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah secara spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Pada tahun Perubahan anggaran 2023, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tujuan dan Sasaran tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan hasil akhir dari proses perencanaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kata lain pelaksanaan strategi, kebijakan serta program dan kegiatan, tujuan akhirnya adalah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran baik untuk jangka waktu 1 tahunan Rencana Kerja maupun 3 tahun periode Perubahan Rencana strategis. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN
				2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Temuan Material	0,5%
			2. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%
			3. Persentase Nilai SAKIP OPD	81%
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas (Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah	4. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	100%
			5. Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP	100%
			6. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan	100%
			7. Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%
			8. Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD	2%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Pada tahun 2023, terdapat **3 Program, 14 Kegiatan Dan 64 Sub Kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh BKAD Prov. SulSel, dengan rincian sebagai berikut :

1. **2 Program Teknis**, berisi kegiatan-kegiatan teknis yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKAD, yaitu kegiatan terkait Penganggaran, Penatausahaan dan Perbendaharaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari **5 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan**
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari **1 Kegiatan, Dan 9 Sub Kegiatan**
2. **1 Program Rutin/Umum**, yang berisi sekumpulan kegiatan yang menunjang keberhasilan program teknis tersebut diatas, yang banyak terkait dengan kegiatan perencanaan, keuangan dan umum, kepegawaian serta hukum di lingkup BKAD Prov. SulSel :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari **8 Kegiatan, Dan 22 Sub Kegiatan**

Kedua kelompok program tersebut saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023. Program dan kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKAD Prov. SulSel. Selanjutnya, untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indikator kinerja serta pendanaan yang indikatif, yang menggambarkan tolok ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan kegiatan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan

peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

Berikut ini dipaparkan program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif untuk tahun 2023, yang dapat dilihat pada **Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKAD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**, dibawah ini :



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	2	KEUANGAN			2,607,850,883,054					3,151,761,295,120			
5	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			39,482,828,392					43,594,516,008			
5	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,834,233,700					2,600,000,000			
5	0	0	1.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	0	0	1.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	1	1											
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Dokumen	315,052,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	700,000,000	

5	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	453,442,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	500,000,000
5	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	61,662,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	350,000,000
5	0	0	1.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 Laporan	1,004,073,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58 Laporan	1,050,000,000
5	0	0	1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28,995,936,503					27,204,516,008
2	1	1	2											

5	0	0	1	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137 Orang/Bulan	27,646,862,603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/Bulan	25,024,516,008
5	0	0	1	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3077 Dokumen	265,257,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3077 Dokumen	350,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Dokumen	430,500,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	450,000,000
5	0	0	1	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Dokumen	76,743,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	11 Dokumen	400,000,000

5	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Laporan	576,573,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	980,000,000
5	0	0	1.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				230,731,000					380,000,000
5	0	0	1.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	230,731,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	380,000,000
5	0	0	1.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,295,684,353					5,000,000,000
5	0	0	1.	0	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435 Paket	378,715,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	435 Paket	700,000,000

5	0	0	1	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Kota Makassar, Semaa Kecamatan, Semaa Kelurahan	16 Dokumen	2,629,231,353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	16 Dokumen	3,200,000,000
2	1	5												
5	0	0	1	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Makassar, Semaa Kecamatan, Semaa Kelurahan	50 Orang	143,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	50 Orang	250,000,000
2	1	5												
5	0	0	1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Makassar, Semaa Kecamatan, Semaa Kelurahan	28 Orang	144,278,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	28 Orang	850,000,000
2	1	5												
5	0	0	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,511,160,600					2,130,000,000
2	1	6												

5	0	0	1.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520 Paket	100,043,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	520 Paket	250,000,000
2	1	6	0	1										
3	0	0	1.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1160 Paket	327,214,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1160 Paket	400,000,000
2	1	6	0	2										
5	0	0	1.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	300,128,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	630,000,000
2	1	6	0	8										
5	0	0	1.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	783,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850,000,000
2	1	6	0	9										

5	0	0	1.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah				672,075,100				1,380,000,000	
2	1	7	0											
5	0	0	1.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122 Unit	672,075,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	122 Unit	1,380,000,000
2	1	7	0											
5	0	0	1.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45,021,000				200,000,000	
2	1	8	0											
5	0	0	1.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	45,021,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200,000,000
2	1	8	2											
5	0	0	1.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2,897,986,136				4,700,000,000	
2	1	9	0											

5	0	0	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44 Unit	1,059,501,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	2,000,000,000
5	0	0	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	1,227,966,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,800,000,000
5	0	0	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	323 Unit	610,519,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Sekretariat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	323 Unit	900,000,000
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				2,563,366,770,662					3,100,946,779,112
5	0	0	1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				3,853,520,000					6,065,000,000

5	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	59,396,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	195,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	40,848,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	130,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 dokumen	309,870,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 dokumen	450,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 dokumen	312,905,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi	53 dokumen	450,000,000

5	0	0	1	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	70,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi	53 Dokumen	70,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	2,354,469,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	3,050,000,000

5	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	403,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen	650,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	332,481,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	1,000,000,000
5	0	0	1	1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	
5	0	0	1		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				2,062,323,300					3,300,000,000
5	0	0	1	0	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	393,429,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	24 Laporan	550,000,000

5	0	0	1	0	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Laporan	230,435,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 Laporan	450,000,000
					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Laporan	499,984,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	74 Laporan	600,000,000
					Asistensi Pengkajian Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	4 Dokumen	

5	0	0	1.	0	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	468,485,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	2 Laporan	1,000,000,000
5	0	0	1.	1	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	299,992,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24 Dokumen	400,000,000
5	0	0	1.	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361 Dokumen	169,996,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	361 Dokumen	300,000,000

5	0	0	1.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			3,498,309,800					5,640,000,000	
2	2	3	0	0	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	1,724,573,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10 Dokumen	2,510,000,000
5	0	0	1.	0	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	721 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	721 Dokumen	350,000,000
2	2	3	0	3										
5	0	0	1.	0	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	429,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8 Dokumen	700,000,000
2	2	3	0	5										

5	0	0	1	0	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dokumen	341,987,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13 Dokumen	500,000,000
5	0	0	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Laporan	268,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		500,000,000

5	0	0	1.	0	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		230,000,000
5	0	0	1.	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perbendaharaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Orang	850,000,000
5	0	0	1.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2,787,386,000					4,600,000,000
5	0	0	1.	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131 Dokumen	299,987,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	131 Dokumen	500,000,000

5	0	0	1.	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1166 Laporan	649,984,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1166 Laporan	900,000,000
	2	2	4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	1,179,996,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	9 Dokumen	1,700,000,000
5	0	0	1.	0	Penyusunan Tanggapan/Tidak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tidak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Dokumen	247,444,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tidak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25 Dokumen	650,000,000
	2	2	4	6										

5	0	0	1.	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288 Orang	409,972,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	288 Orang	450,000,000
5	0	0	1.	0	Penujang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2,551,165,221,562					3,081,341,779,112
5	0	0	1.	0	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	2,049,717,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4 Laporan	2,200,000,000
5	0	0	1.	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	542,224,433,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Akuntansi	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	267,463,547,000

5	0	0	1.	0	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	11,726,586,278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembendaharaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan	40,000,000,000
2	2	5												
5	0	0	1.	1	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	1,995,164,684,133	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	2,771,678,232,112
2	2	5												
5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				5,001,284,000					7,220,000,000
2	3				Pengelolaan Barang Milik Daerah				5,001,284,000					7,220,000,000
5	0	0	1.	0	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	313,366,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	500,000,000
2	3	1												

5	0	0	1.	0	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60,852,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	120,000,000
5	0	0	1.	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	40,530,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	200,000,000
5	0	0	1.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191 Laporan	247,945,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	191 Laporan	400,000,000
5	0	0	1.	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Laporan	1,042,845,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	55 Laporan	1,350,000,000
5	0	0	1.	0	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	1,423,067,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	2,200,000,000

5	0	0	1.	0	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	618.622,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	800,000,000
2	3	1												
5	0	0	1.	0	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	387,329,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	550,000,000
2	3	1												
5	0	0	1.	1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59 Dokumen	857,724,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59 Dokumen	1,100,000,000
2	3	1												
TOTAL									2,607,850,883,054				3,151,761,295,120	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Tahun 2023 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh *stakeholder* untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2023, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Renja ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-PD) Tahun 2023;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BKAD Prov. SulSel wajib menjadikan dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023

dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan setiap 3 bulan;

4. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renja secara berkala dengan melibatkan *stakeholder* dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama Tahun 2023.

Berdasarkan Kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bidang/unit kerja lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang disusun sebelum melaksanakan program dan kegiatan. Penyusunan Renja ini tentunya tidak lepas dari hasil evaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya, penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis BKAD 2018-2023, serta berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, dan juga dengan tetap memperhatikan peluang, potensi, dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan hanya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tetapi juga merupakan tanggung jawab sebuah organisasi kepada masyarakat dalam mengemban amanah. Besar harapan kami, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2023 ini dapat memberi sumbangsih bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BKAD Prov. SulSel, serta menjadi cerminan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk itu mohon dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menuju kesempurnaan dokumen perencanaan.

Makassar, 1 Juni 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan



Drs. H. Muhammad Rasyid
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641231 199203 1 123